

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
 NOMOR : 34 /Kept/Sekda/2015
 TANGGAL : 20 - 11 - 2015

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1.	Riwayat dan kondisi Pegawai	- Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP			
	a. Data Pribadi pelamar umum pegawai	- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	- Selama proses rekrutmen pegawai	- Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan
	b. Biodata Pegawai	- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	- Selama yang bersangkutan menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan
2.	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	- Pasal 17 huruf h angka 2 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP			
	a. Data rekam medis pasien rumah sakit/poliklinik	- Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas iManusia - PP No. 26 Th. 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS - Permenkes No. 269/mankes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis - Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Provinsi DiY No. 12 tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	- Hingga pasien meninggal dunia - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi

	b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai	- PP No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS	- Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi
	c. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling	- Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural	- Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	d. Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	- Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS	- Selama menjadi pegawai	- Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan Rekening bank seseorang	- Pasal 17 huruf h angka 3 UU no.14 Tahun 2008 ttg KIP			
	a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	- Kepmendagri tentang transparansi Pengelolaan keuangan daerah	- Sampai audit selesai	- Belum terjaminnya kebenaran informasi	- Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos
	b. Kode PIN Rekening Bank Pegawai	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6	- Selama kode masih digunakan	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Menjaga keamanan rekening Bank
4.	Hasil-hasil Evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	- Pasal 17 huruf h angka 4 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP			
	a. Daftar nilai DP3 Pegawai	- PP 10 Th 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	- Selama 3 periode penilaian	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	- PP No. 9 Th. 2003 ttg Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai	- Sampai diterbitkan SK	- Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
	c. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- PP nomor 13 Th 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	- Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	- Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

5	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X SangatRahasia (SR) dan Rahasia@ dan Kofidensial	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Prov. DIY - Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 	- Hingga proses surat tersebutselesai	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kebijakan Pimpinan, - Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga suasana kondusif di lingkungankerja' - Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pasal 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa 	- Selama proses pengadaan barang/jasa	- Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
7	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa 	- Selama proses pengadaan barang/jasa	- Muncul persaingan tidak sehat	- Dapat menjaga objektivitas penilaian
8	Kode Akses elektronik aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6	- Selama kode masih digunakan	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
9	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP	- Sesuai peratura nperundang-undangan yang berlaku	- Sesuaialasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
10	Data Pasien HIV/AIDS	Perda Provinsi DIY No.2 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Perda Provinsi DIY No.2 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
11	Dokumen kependudukan yang meliputi : a. Biodata Penduduk b. KK c. KTP d. Surat Keterangan Kependudukan e. Akta Pencatatan Sipil	- UU .23/2006 tentang Adminitrasi Kependudukan pasal 79 dan 84;	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi melindungi dari penyalahgunaan data/informasi ybs

	f. Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan akta pengakuan anak	-			-
12	Besaran Pajak dan Wajib Pajak	- Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Selama yang bersangkutan masih hidup - Selama menjadi Wajib Pajak; - Apabila mendapat persetujuan Wajib Pajak - Diperlukan untuk kepentingan Pengadilan	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Mengetahui rahasia Perusahaan yang bersangkutan	- Menjaga privasi Perusahaan
13	Pengumuman, Penutupan dan Pencabutan Status Daerah Wabah Zoonosa	- Pasal 40-47 & 57, UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Pasal 3,4 & 10, UUNo. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. - PP No. 4 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit	Hingga dilaksanakan oleh Menteri	Penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menjaga suasana kondusif pada wilayah yang terserang wabah zoonosa.
14	Usulan Besaran UMK dari Dewan - Pengupahan Kota/Kabupaten	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; - Kepres No.107/2004 tentang Dewan Pengupahan	Sampai dikeluarkan Rekomendasi UMK dari Bupati ke Gubernur	Dapat menimbulkan Demo, unjuk rasa/gejolak	Menjaga suasana Hubungan Industrial yang kondusif
15	Mediasi perselisihan Hubungan Industrial	UU No.2/2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama proses mediasi	Dapat mengungkap data para pihak yang berselisih yang bersifat rahasia	Menjaga suasana Hubungan Industri yang kondusif
16	Data industial dan kawasan industri	UU no. 3 tahun 2014 pasal 69 tentang Perindustrian	Selama masih digunakan untuk kawasan industri	Dapat mengungkap data perusahaan (pemerakarsa) khususnya pemilik modal asing	Menjaga suasana yang kondusif
17	Penetapan klasifikasi informasi di lingkungan Kemen PU	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no 391/KPTS/M/2011	Selama proses klasifikasi	Mengungkap data kebijakan pemerintah yang bersifat rahasia	Menjagasuasana yang kondusif
18	Proses Evaluasi Andalalin	PP.No.32/2011, tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kabutuhan Lalulintas	Selama proses Evaluasi	Mengungkap data Perusahaan (Pemerakarsa) yang bersifat rahasia	Menjaga/melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjaga suasana kondusif lingkungankerja.

19	Hasil Evaluasi Kajian Andalalin	PP.No.32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas	Apabila ada persetujuan pemrakarsa	Mengungkap data perusahaan (Pemrakarsa) yang bersifat rahasia	Menjaga privasi, melindungi dari penyalahgunaan data/informasi oleh pihak lain serta menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
20	Dokumen Perizinan	UU No. 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	- Selama izin masih dipergunakan - Apabila mendapat persetujuan dari pemegang izin - Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang berwenang	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
21	Izin Perceraian PNS	UU No. 8/1974 tentang Perkawinan	Proses perizinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Kelancaran proses perceraian
22	SPJ, SPM, SPP, SP2D	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, - UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkap data ketidakwajaran	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
23	Data Aplikasi MDK (Pemutakhiran Data Keluarga) by name by address	UU 52 Th. 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Yang bersangkutan meninggal dunia	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
24	Data Kegagalan dan Komplikasi KB	UU 52 Th. 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Yang bersangkutan meninggal dunia	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia - Mengamankan program KB
25	Informasi mengenai Data dan permasalahan Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada anak yang melakukan pengaduan di Tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Bantul	- UU No. 22 Tahun 2003 mengenai Hak-hak Perlindungan Anak - PP No. 41 Th 2003	Selamanya	Mengungkapkan data Korban/Pelapor yang menjadi Rahasia	Menjaga privasi dan keamanan Korban dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti: ancaman, dll
26	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No 5 Tahun 2006 2. Peraturan Mendagri No 51 Tahun 2010	Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang	Menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Rekomendasi/Pernyataan yang dimuat dalam LHP dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola

27	Laporan pemeriksaan oleh tim Auditor (Bank Indonesia/OJK/Akuntan Publik)	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat 33	Tidak terbatas	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
28	Keterangan data nasabah penyimpan dan simpanannya	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat 40	Sampai batas waktu yang diatur dalam Undang-undang	Mengungkap data pribadi nasabah yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
29	Data EX Tapol G 30 S/PKI	Intruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981	Sampai terbitnya Regulasi Baru	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat
30	Dokumen Pertanahan	UU Pertanahan No. 10 Th. 1960	Selama pemilikan tidak berubah	Kerahasiaan hak pemilikan	Penyalahgunaan kewenangan
31	Hukuman Disiplin Pegawai	PP No. 56 tentang Hukuman Disiplin Pegawai	- Selama masih menjadi pegawai - Mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
32	Penilaian Prestasi Kerja PNS	PP 46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
33	Data usulan pemindahan, penyesuaian dan pemberhentian PNS dengan jabatan fungsional tenaga tertentu dan fungsional umum	PP No. 41 tahun 2003	Sampai diterbitkannya SK	Membuat penilaian tidak obyektif	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, *jr*

